

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS OLEH PEMERINTAH SEBAGAI INSTRUMEN STABILISASI HARGA DI PULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT

### *The Effectiveness of the Government's Procurement Price Policy for Paddy and Rice as a Price Stabilization Instrument in Lombok Island West Nusa Tenggara*

Suparmin\*, M Siddik, Anas Zaini, Tajidan

Fakultas Pertanian Universitas Mataram  
Jln. Majapahit No. 62, Mataram 83125, Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
\*Korespondensi penulis. Email: [suparminjinem@unram.ac.id](mailto:suparminjinem@unram.ac.id)

Naskah diterima: 21 Maret 2022

Direvisi: 13 Oktober 2022

Disetujui terbit: 30 Desember 2022

#### ABSTRACT

The main problem in the rice economy is how to keep the price of paddy at the producer (farmer) level not too low and the rice price at the consumer level not too high. The objectives of this study were 1) to analyze paddy price stability at the farmers' level and the effect of the implementation of the Government Procurement Price (HPP) on paddy price received by farmers, 2) to analyze the causes of the price disparity and transmission between paddy and rice prices, and 3) to analyze the effectiveness of HPP policy on the paddy price stability. The data used were the secondary data of 2014-2019, gathered from the National Logistic Agency, Statistics Indonesia, and Regional Agriculture Office, all in West Nusa Tenggara Province. The methods of analysis used were coefficient of variation, simple linear regression, and multiple linear regression. The study's result showed that the HPP policy's impact on the paddy price stability of farmers' level was relatively stable during the 2014 - 2019 period. Other findings were the disparity between the price of paddy and rice was caused by two factors, namely the dynamic price pattern and the flexibility of price transmission. In addition, the implementation of the HPP policy on paddy price stability was effective. The recommendation from this study is the government should strengthen the bargaining position of farmer groups by encouraging them to sell dried-milled paddy, provide adequate drying facilities, and continue and maintain effectivity of the HPP and related policies.

**Keywords:** *government procurement price, Lombok Island, paddy, price stabilization policy, rice*

#### ABSTRAK

Masalah utama dalam perekonomian beras adalah menjaga agar harga gabah di tingkat produsen (petani) tidak terlalu rendah, dan bagaimana menjaga agar harga beras di tingkat konsumen tidak terlalu tinggi. Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis stabilitas harga gabah di tingkat petani dan pengaruh penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap harga gabah yang diterima petani, 2) menganalisis penyebab disparitas dan transmisi harga antara harga gabah dan beras, dan 3) menganalisis efektivitas kebijakan HPP terhadap stabilitas harga gabah. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2014-2019, dikumpulkan dari Badan Urusan Logistik, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Pertanian Daerah, semuanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Metode analisis yang digunakan adalah koefisien variasi, regresi linier sederhana, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak penerapan kebijakan HPP terhadap stabilitas harga gabah di tingkat petani relatif stabil selama periode 2014 - 2019. Temuan lainnya, disparitas harga gabah dan beras disebabkan oleh dua faktor, yaitu pola dinamika harga dan fleksibilitas transmisi harga. Selain itu, implementasi kebijakan HPP tentang stabilitas harga gabah juga efektif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah harus memperkuat posisi tawar kelompok tani dengan mendorong mereka melalui penjualan produk dalam bentuk gabah kering giling, menyediakan fasilitas pengeringan yang memadai, dan melanjutkan dan menjaga efektivitas HPP dan kebijakan terkait.

**Kata kunci:** *beras, gabah, harga pembelian pemerintah, kebijakan stabilisasi harga, Pulau Lombok*

## PENDAHULUAN

Program stabilisasi harga beras yang umum dilakukan pemerintah adalah stabilisasi harga antar-waktu (*inter-temporal*). Stabilisasi harga antarwaktu dibedakan atas dua tipe yaitu variasi harga antar-musim dan antartahun (*intra and inter year*). Pengetahuan mengenai perbedaan tipe variasi harga ini penting dalam penerapan instrumen kebijakan, apakah akan membawa harga ke arah fluktuasi yang ekstrim atau yang normal. Oleh karena itu kedua tipe stabilisasi harga ini masih tetap dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengintervensi pasar beras domestik ke arah terwujudnya ekonomi perberasan yang lebih adil. Untuk mendukung program stabilisasi harga gabah dan beras pemerintah telah menetapkan kebijakan harga dasar gabah yang disebut sebagai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Menurut Suryana et al. (2014) kebijakan ini mulai dilaksanakan dari tahun 2000 sampai sekarang.

Ada dua alasan pokok mengapa pemerintah merasa perlu mengintervensi pasar gabah dan beras domestik secara aktif, yaitu karena pasar gabah dan beras sangat tergantung pada: (1) kondisi domestik yaitu produksi usaha tani padi, sifat gabah dan beras, dan karakteristik petani, dan (2) kondisi internasional yaitu pasar beras dunia, pasar uang, dan pasar minyak dunia. Kondisi pasar gabah dan beras domestik ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, sementara diketahui bahwa keadaan suplai gabah dan beras selalu berubah sepanjang tahun namun di sisi permintaan relatif konstan. Hal ini berakibat kepada pembentukan harga gabah dan beras berfluktuasi sepanjang tahun. Jusar et al. (2017) menyatakan bahwa banyak faktor yang dapat memengaruhi perilaku permintaan maupun penawaran dalam interaksi pembentukan harga. Namun, untuk komoditas pangan atau pertanian, pembentukan harga disinyalir lebih dipengaruhi oleh sisi penawaran dibandingkan sisi permintaan. Sisi penawaran lebih berpengaruh karena sisi permintaan cenderung lebih stabil dibanding sisi penawaran.

Produksi padi Indonesia sangat tergantung pada kondisi iklim dan cuaca. Pada musim hujan produksi padi umumnya melimpah dan pada musim kemarau produksi menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) mempublikasikan bahwa produksi padi di Provinsi NTB mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir 2018 sampai dengan 2020. Sementara itu produksi padi di Pulau Lombok juga mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir 2018 sampai 2020. Produksi rata-rata

padi ini mengikuti pola panen musiman, puncak panen raya terjadi antara bulan Januari-April sebesar 49,25%, musim gadu antara Mei-Agustus sebesar 31,80% dan produksi terendah pada musim pacekelik terjadi antara bulan September-Desember sebesar 18,95% (BPS 2021). Dengan produksi yang bersifat musiman, sifat sangat rentannya produksi terhadap serangan hama dan penyakit, dan adanya bencana alam setiap tahun menyebabkan usahatani padi memiliki resiko yang sangat tinggi. Sebagai akibatnya penawaran beras berfluktuasi sangat tinggi, baik antar musim maupun antar tahun.

Secara umum sarana yang dimiliki petani dalam pengelolaan gabah masih kurang memadai, antara lain tidak memiliki lantai jemur untuk pengeringan gabah dan tidak memiliki gudang untuk penyimpanan. Maulana dan Rachman (2011) menyatakan bahwa dalam pemasaran hasil posisi tawar petani padi cenderung lemah, karena: (a) umumnya petani menjual padi segera setelah panen dalam bentuk gabah kering panen (GKP), dan bahkan secara tebasan, (b) petani dihadapkan pada kebutuhan uang tunai untuk penggarapan lahan pertanaman berikutnya, karena itu nilai tambah dari pasca panen lebih banyak dinikmati oleh para pedagang, dan (c) penawaran padi tidak elastik dan pasar padi tersegmentasi secara local. Kemudian yang sering menjadi masalah adalah rendahnya kualitas gabah yang dijual karena tingginya kadar air akibat pada saat panen di musim hujan seringkali terjadi cuaca mendung atau hujan. Kegagalan pasar gabah lokal inilah yang menjadi alasan kuat masih perlunya intervensi pemerintah dalam pasar gabah dan beras. Menurut Hermanto dan Saptana (2017) pemerintah sangat berkepentingan dalam mengendalikan stabilitas pasokan dan harga beras melalui kebijakan gabah/beras baik yang bersifat protektif maupun yang bersifat promotif, yang kesemuanya mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap kesejahteraan para petani.

Persoalan klasik dari komoditas beras bertitik tolak dari dua masalah utama yaitu bagaimana mempertahankan harga gabah di tingkat produsen (petani) tidak terlalu rendah, dan bagaimana mempertahankan harga beras di tingkat konsumen tidak terlalu tinggi. Permasalahan ini berawal dari masih tingginya ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras sebagai pangan pokok. Di samping itu, penyebab lainnya adalah penguasaan lahan petani yang semakin sempit sebagai akibat dari pembagian warisan dan keuntungan usahatani padi tidak memberikan hasil yang layak bagi

petani, dan sistem pendataan yang masih kurang baik.

Kebijakan harga gabah dan beras pada saat ini sudah mengarah pada kebijakan harga yang memperhatikan dimensi perbedaan bentuk, jenis, kualitas, dan tingkatan dalam rantai pasar, namun belum memperhatikan dimensi musim panen. Kebijakan harga tersebut juga masih diatur dalam peraturan perundangan yang terpisah-pisah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas mengimplementasikan kebijakan stabilisasi harga beras diperlukan kebijakan harga gabah/beras yang komprehensif. Untuk itu, perlu dirumuskan suatu kebijakan yang mampu melakukan harmonisasi hubungan antara petani produsen, industri pengolahan, lembaga pemasaran, hingga ke tingkat konsumen dalam suatu rantai pasok dan rantai nilai tambah yang efisien dan memberikan keuntungan yang wajar bagi masing-masing pihak (Rachman et al. 2019). Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan instrumen kebijakan untuk meredam gejolak harga tersebut melalui: 1) menetapkan kebijakan harga yang disebut sebagai HPP, 2) menetapkan kebijakan harga tertinggi untuk beras melalui operasi pasar, dan 3) penganakan tarif impor beras dan pengaturan jadwal impor beras.

Mengacu pada uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak HPP terhadap tingkat harga dan stabilitas harga gabah ditingkat petani, 2) penyebab disparitas harga gabah dengan harga beras, proses transmisi harga gabah dan beras di tingkat lembaga pemasaran, 3) efektivitas kebijakan Harga Pembelian Pemerintah.

## METODOLOGI

### Lingkup dan Jenis Data Penelitian

Cakupan penelitian ini adalah Pulau Lombok Provinsi NTB yang terdiri dari lima kabupaten dan kota yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Data yang digunakan adalah data sekunder, dan pengumpulan data dilaksanakan secara langsung dari Badan Usaha logistik (Bulog) NTB, BPS NTB, Dinas Pertanian NTB. Data sekunder yang dikumpulkan merupakan data runtun waktu bulanan untuk kurun waktu tahun 2014 sampai 2019. Data sekunder yang dikumpulkan adalah harga beras di tingkat konsumen, harga gabah di tingkat petani, harga dasar gabah, dan produksi padi. Analisis data

terdiri dari tiga bagian utama yaitu stabilitas harga gabah dan harga beras, disparitas harga gabah dan beras, dan efektivitas kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap stabilitas harga gabah. Pembahasan dalam setiap bagian terdiri dari hasil studi empiris dari penelitian sebelumnya dan teori-teori pendukungnya. Waktu penelitian selama 8 bulan mulai dari Mei sampai Desember 2020

### Analisis Data

#### ***Stabilitas Harga Gabah dan Pengaruh Penerapan HPP terhadap Harga Gabah di Tingkat Petani***

Untuk mengukur tingkat stabilitas harga gabah dan beras digunakan dua indikator yaitu selang harga tertinggi dan terendah, dan koefisien variasi. Pertama, dengan rasio harga tertinggi dan terendah (perbedaan antara indeks harga bulanan tertinggi dengan terendah), angka indeks dari harga bulanan adalah dengan membuat indeks dasar (100) pada bulan Januari setiap tahun. Selisih angka indeks tertinggi dengan terendah dalam setahun merupakan tingkat fluktuasi harga gabah dan beras. Untuk mendapatkan angka indeks harga ini dapat dilakukan prosedur sebagai berikut: misalkan indeks dasar adalah harga gabah pada Bulan Januari sama dengan 100, kemudian dicari koefisien pengali (c):

$$c = \frac{100}{PGP_1} \dots\dots\dots(1)$$

keterangan:  $PGP_1$  adalah harga gabah petani pada bulan 1 (Januari). Untuk mendapatkan angka indeks untuk Bulan Pebruari ( $I_2$ ) sampai Desember ( $I_{12}$ ) dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$I_2 = c * PGP_2 \dots\dots\dots(2)$$

$$I_{12} = c * PGP_{12} \dots\dots\dots(3)$$

Selisih antara angka indeks tertinggi dengan terendah merupakan selang yang juga merupakan tingkat fluktuasi harga gabah petani. Pengukuran dengan cara yang sama juga dilakukan untuk melihat fluktuasi harga beras di tingkat konsumen.

Kedua, Koefisien Variasi secara umum dapat dihitung dengan rumus standard deviasi harga bulanan setiap tahun dibagi dengan harga rata-rata (Hasan 2017).

$$CV = \frac{S}{\bar{X}} \dots\dots\dots (4)$$

keterangan:

CV adalah koefisien variasi, S adalah standard deviasi variabel, dan  $\bar{X}$  adalah rata-rata variabel. Dalam menghitung koefisien variasi harga gabah petani dan harga beras di tingkat konsumen setiap tahun dirumuskan sebagai berikut:

$$CV_{HGP} = \frac{SD_{HGP}}{HGP} \dots\dots\dots (5)$$

$$CV_{HBK} = \frac{SD_{HBK}}{HBK} \dots\dots\dots (6)$$

dimana:

- $CV_{HGP}$  = koefisien variasi harga gabah petani
- $CV_{HBK}$  = koefisien variasi harga beras di tingkat konsumen
- $SD_{HGP}$  = standar deviasi harga gabah petani
- $SD_{HBK}$  = standar deviasi harga beras di tingkat konsumen
- $\bar{HGP}$  = harga rata-rata gabah petani
- $\bar{HBK}$  = harga rata-rata beras konsumen

Untuk mengukur pengaruh HPP terhadap tingkat harga gabah petani digunakan model regresi linier sederhana dengan persamaan berikut (Saludin 2017):

$$HGB_t = b_0 + b_1 HPP_t + e_t \dots\dots\dots (7)$$

Keterangan:

- HGB = harga gabah petani (Rp/kg)
- HPP = harga pembelian pemerintah (Rp/kg)
- $b_0$  = konstanta
- $b_1$  = koefisien regresi
- t = waktu (bulan)
- e = error term

Untuk meyakinkan hasil koefisien regresi ( $b_0$  dan  $b_1$ ) yang diperoleh dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat, maka dilakukan uji secara statistik melalui uji keseluruhan (Uji-F) dan uji parsial (Uji-t).

**Disparitas Harga Gabah dengan Harga Beras**

Untuk menganalisis penyebab disparitas harga gabah dan beras digunakan analisis korelasi dan Fleksibilitas Transmisi Harga. Transmisi harga diukur melalui regresi sederhana di antara dua harga pada dua tingkat pasar, kemudian dihitung. Secara matematis

elastisitas transmisi harga ( $E_t$ ) dapat dituliskan sebagai berikut (Kusumah 2018) :

$$P_f = b_0 P_r^{b_1} \dots\dots\dots (8)$$

Ditransformasikan dalam bentuk linear menjadi:

$$\ln P_f = \ln b_0 + b_1 \ln P_r \dots\dots\dots (9)$$

atau:

$$\ln HGPt = \ln b_0 + b_1 \ln HBEt + e_t \dots\dots (10)$$

keterangan:

- $b_0$  = intersep
- $b_1$  = Koefisien elastisitas transmisi harga
- HGP = harga gabah petani (Rp/kg)
- HBE = harga beras di tingkat pengecer (Rp/kg)
- $b_0$  = konstanta
- $b_1$  = koefisien regresi
- t = waktu (bulan atau tahun)
- e = error term

Untuk meyakinkan hasil koefisien regresi ( $b_0$  dan  $b_1$ ) yang diperoleh dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat, maka dilakukan uji secara statistik melalui uji keseluruhan (Uji-F) dan uji parsial (Uji-t).

**Efektifitas Kebijakan Stabilisasi Harga Gabah Petani**

Untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah (Bulog) melalui penerapan harga pembelian pemerintah terhadap stabilitas harga gabah petani, maka digunakan tiga pendekatan analisis yaitu (1) dengan model regresi linier sederhana, variabel yang akan dimasukkan dalam model adalah harga gabah petani (HGP) sebagai variabel dependent (variabel terikat), dan HPP) sebagai variabel independent (variabel bebas), (2) menggunakan analisis integrasi vertikal dengan model regresi linier sederhana, harga beras eceran di tingkat konsumen sebagai variabel independent dan harga gabah petani sebagai variabel dependent, dan (3) dengan analisis deskriptif. Bentuk persamaan secara umum sebagai berikut:

Untuk melihat dampak HPP dan harga beras terhadap tingkat stabilitas harga gabah petani digunakan analisis regresi linier berganda yaitu dengan persamaan berikut (Saludin 2017):

$$HGB_t = b_0 + b_1 HPP_t + b_2 HBEt + e_t \dots (11)$$

Keterangan:

- HGB = harga gabah petani (Rp/kg)
- HPP = harga pembelian pemerintah (Rp/kg)
- HBE = harga beras eceran (Rp/kg)
- $b_0$  = konstanta
- $b_1$  dan  $b_2$  = koefisien regresi
- t = waktu (bulan)
- e = error term

Untuk meyakinkan hasil koefisien regresi ( $b_0$ ,  $b_1$ ,  $b_2$ ) yang diperoleh dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat, maka dilakukan uji secara statistic melalui uji keseluruhan (Uji-F) dan uji parsial (Uji-t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak HPP terhadap Tingkat Harga dan Stabilitas Harga Gabah di Tingkat Petani

Peran Bulog dalam pemasaran beras domestik dilakukan melalui kegiatan operasi pasar murni yang bertujuan untuk mengendalikan agar harga beras domestik tidak naik terlalu tinggi sehingga masih dalam jangkauan konsumen. Peran lainnya adalah dalam pengadaan gabah atau beras domestik dengan tujuan untuk mengendalikan agar harga gabah tidak jatuh terlalu rendah yang berakibat pada kerugian petani produsen. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun terjadi gejolak harga gabah dan harga beras yang cukup bervariasi. Untuk jelasnya fluktuasi harga gabah dan harga beras dapat dilihat dalam Tabel 1.

Dalam periode tahun 2014 sampai 2019 harga gabah petani di Pulau Lombok berfluktuasi dengan koefisien variasi berkisar antara 4% pada tahun 2014 sampai 10% pada tahun 2019, sedangkan fluktuasi harga beras berkisar antara 4% pada tahun 2013 sampai 7% pada tahun 2017. Nilai koefisien variasi ini dianggap masih relatif kecil dan menunjukkan keadaan stabilitas harga gabah dan beras di Pulau Lombok masih relatif stabil. Hal ini sejalan dengan pendapat Proborini et al. (2018) dan Jusar et al. 2017 bahwa koefisien variasi yang lebih kecil dari standar nilai CV minimum untuk stabilitas harga yang ditetapkan sesuai Kementerian Perdagangan (2010), yaitu kurang dari 10%

menunjukkan keadaan yang relatif stabil. Pendapat Suryana et al. 2014 juga mempertegas bahwa dengan nilai CV rata-rata di bawah 10% menunjukkan keadaan yang stabil.

Bila dibandingkan dengan komoditas lain, komoditas gabah atau beras masih lebih stabil, seperti pendapat Abubakar (2009) menyatakan bahwa besaran instabilitas harga beras dengan empat komoditas pangan lainnya seperti terigu, kedelai, minyak goreng dan jagung, ternyata beras yang paling stabil. Hasil penelitian Nuraeni et al. (2015) periode 2005-2014 menyatakan bahwa stabilitas harga bawang merah di tingkat produsen di Jawa Barat sangat tidak stabil dengan nilai CV sebesar 24,15 %. Dengan demikian, stabilitas harga gabah petani di Pulau Lombok menunjukkan hubungan yang sejalan dengan distribusi yang hampir merata sepanjang tahun serta mekanisme stok yang berjalan dengan baik sehingga produksi saat musim panen raya mampu mencukupi kebutuhan saat musim paceklik.

Kenaikan harga gabah tertinggi secara umum terjadi pada Bulan Desember setiap tahun, sedangkan penurunan harga gabah biasanya pada bulan april sampai Mei setiap tahun. Dapat diperkirakan bahwa pada Bulan Oktober, November, dan Desember mulainya musim hujan, pada saat ini produksi padi mulai berkurang yang kemudian menyebabkan pasokan gabah menurun dan memicu harga gabah naik. Sementara pada Bulan April dan Mei produksi padi mengalami kenaikan, karena pada saat ini hampir semua lahan petani melaksanakan panen padi, sehingga suplai padi mengalami kenaikan dan memicu harga gabah menurun.

Hasil penelitian Setiawan dan Hadianto (2014) di Propinsi Banten juga menyatakan bahwa rata-rata perubahan harga beras bernilai

Tabel 1. Perkembangan selang harga dan koefisien variasi harga gabah dan harga beras di Pulau Lombok, 2013-2019

Tahun	Selang harga (GKP)	Harga tertinggi-harga terendah (GKP)	Koefisien variasi harga (GKP)	Koefisien variasi harga beras (beras eceran)
2013	19	Desember-Januari	0.05	0.04
2014	8	Desember-April	0.04	0.06
2015	26	Desember-Mei	0.10	0.07
2016	18	Pebruari-April	0.07	0.05
2017	33	Desember-Januari	0.08	0.07
2018	18	Desember-April	0.06	0.06
2019	24	Desember April	0.10	0.06

Sumber: BPS NTB (2020), diolah

positif, yaitu 7,99% dan mengikuti pola berulang setiap tahunnya. Pola musiman pada data harga beras diduga dipengaruhi oleh musim panen yaitu, peningkatan harga terjadi pada puncaknya ketika musim paceklik, sebaliknya terjadi penurunan ketika memasuki musim panen raya. Harga terendah terjadi pada April 2011 sebesar Rp6.439/kg. Harga tertinggi dicapai pada tingkat harga Rp8.805/kg pada Desember 2014. Pendapat ini diperkuat oleh BPS (2021) bahwa produksi rata-rata padi ini mengikuti pola panen musiman, puncak panen raya terjadi antara Bulan Januari-April sebesar 49,25%, musim gadu antara Mei-Agustus sebesar 31,80% dan produksi terendah pada musim paceklik terjadi antara Bulan September-Desember sebesar 18,95%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa fluktuasi harga beras lebih kecil dibandingkan dengan fluktuasi harga gabah. Secara riil ini menunjukkan bahwa kebijakan perberasan pemerintah bias ke kepentingan masyarakat kota. Pemerintah lebih khawatir terhadap kenaikan harga beras di tingkat konsumen daripada turunnya harga gabah di tingkat petani. Instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk meredam gejolak harga beras di tingkat konsumen meliputi: jaminan distribusi beras kepada golongan anggaran, subsidi kepada masyarakat miskin, dan injeksi pasar, sementara instrumen kebijakan untuk meredam turunnya harga gabah hanya satu yaitu operasi pembelian gabah, pembelian disesuaikan dengan kebutuhan, yang seringkali tidak efektif. Kondisi ini diperburuk oleh sifat harga gabah yang musiman, atau jangka pendek, sementara fluktuasi harga beras yang bersifat tahunan atau jangka panjang.

Pengaruh kebijakan HPP terhadap tingkat harga gabah petani dapat dilihat dari hasil pengujian secara statistik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Harga HPP berpengaruh secara nyata terhadap harga GKP pada taraf nyata 99%. Bila dilihat lebih jauh besarnya pengaruh variabel bebas ini (HPP) terhadap variable terikat harga GK, pengaruhnya relatif kurang besar yaitu sebesar 50,90 % (koefisien

determinasi =  $R^2$ ) dan juga kekuatan hubungan antara kedua variable cukup kuat yaitu sebesar 71,30 % (koefisien korelasi =  $r$ ). Ini artinya masih ada faktor lain yang mempengaruhi harga gabah petani. Walaupun demikian bila dilihat dari besaran koefisien regresinya sebesar 1,878, berarti setiap kenaikan harga pembelian pemerintah sebesar Rp1.000,- per kilogram maka akan meningkatkan harga GKP sebesar Rp1.878,- per kilogram (Tabel 2). Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga gabah melalui kebijakan HPP setiap tahun tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan. Artinya kebijakan tersebut dapat direspons secara baik oleh petani dan pedagang.

### Disparitas dan Transmisi Harga Gabah dan Beras

Disparitas harga gabah dan beras dapat disebabkan oleh biaya-biaya pemasaran yang terjadi selama proses perubahan gabah menjadi beras dan proses distribusinya. Sejak padi mulai dipanen sudah mendapatkan beberapa perlakuan diantaranya perontokan, pembersihan, penjemuran, dan penggilingan. Perlakuan tersebut membutuhkan biaya-biaya termasuk di dalamnya biaya distribusi dan kemudian ini menjadi ukuran untuk menetapkan harga beras eceran di tingkat konsumen. Disparitas harga gabah di tingkat petani dengan harga beras eceran di tingkat konsumen merupakan perbedaan harga sebagai akibat dari perlakuan-perlakuan selama terjadinya perubahan bentuk padi menjadi beras.

Selama periode 2014-2019 harga gabah petani berfluktuasi dengan pola yang hampir sama, pada Bulan Maret, April, dan Mei mengalami penurunan sedangkan pada bulan lainnya mengalami kenaikan. Pola perubahan harga yang sama juga terjadi pada harga beras eceran. Pola perubahan harga gabah dan harga beras ini juga membawa disparitas harga gabah petani dengan harga beras eceran dengan pola yang sama, pada bulan Maret, April, dan Mei mengalami penurunan sedangkan pada bulan-bulan lainnya disparitas harga naik.

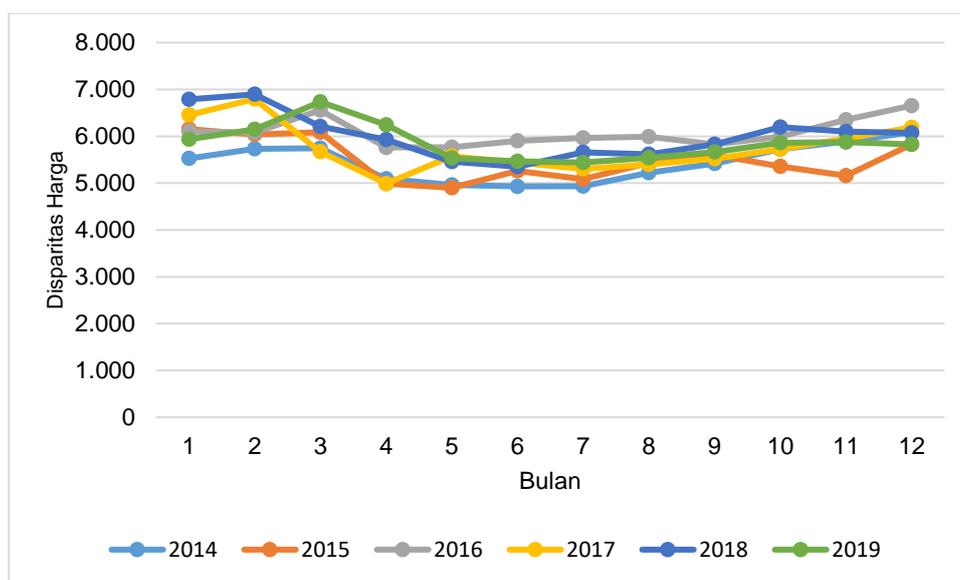
Tabel 2. Hasil analisis regresi pengaruh HPP terhadap harga GKP di Pulau Lombok, 2014-2019

Variabel	Unstandardized Ccoefficients		Standardized coefficients	t	significan
	B	Std. Error			
Constanta	-2777.131	739.996		-3.753	.000
HPP	1.878	.204	.713	9.213	.000

Keterangan: Koefisien determinasi,  $R^2 = 0,509$  dan Koefisien korelasi,  $r = 0,713$

Pada Bulan Maret, April, dan Mei mulai musim panen padi yang cukup tinggi yang kemudian berdampak kepada menurunnya harga gabah, demikian juga harga beras juga ikut turun, sedangkan pada sembilan bulan lainnya produksi gabah mulai menurun dan berdampak kepada naiknya harga gabah dan beras. Disparitas harga yang terjadi selama periode tersebut berkisar antara 111% (November 2015) sampai 165% (Maret 2019). Disparitas harga ini dianggap tidak wajar karena terlalu tinggi (Tabel 3 dan Gambar 1). Jika diperhitungkan faktor inflasi dan upah buruh tani, disparitas

harga itu bahkan menunjukkan kesenjangan yang lebih buruk. Artinya, nilai tambah pengolahan dan perdagangan beras tidak dinikmati petani dan konsumen, tetapi lebih banyak oleh pedagang, pihak penggilingan padi, dan pelaku lain, termasuk Perum Bulog yang memperoleh penugasan pemerintah untuk menjaga stok pangan nasional. Hasil penelitian Sobichin (2013) menyatakan bahwa margin pemasaran tertinggi terjadi di penggilingan padi sebesar 47,4%, kemudian pedagang pengumpul 4,9%, pedagang besar 4,2%, dan pedagang pengecer 3,3% dari keseluruhan nilai margin



Sumber: Dinas Pertanian 2020; BPS NTB 2020

Gambar 1. Pola disparitas harga gabah dengan harga beras, 2014 - 2019

Tabel 3. Disparitas harga gabah petani dengan harga beras eceran di Pulau Lombok, 2014-2019

Bulan	Nilai disparitas harga (Rp/kg)					
	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	5.525	6.152	6.096	6.452	6.788	5.934
Februari	5.730	6.038	6.079	6.795	6.895	6.150
Maret	5.744	6.085	6.559	5.671	6.212	6.735
April	5.092	4.988	5.762	4.990	5.927	6.240
Mei	4.958	4.900	5.767	5.575	5.462	5.535
Juni	4.930	5.262	5.904	5.439	5.350	5.467
Juli	4.933	5.083	5.963	5.300	5.654	5.439
Agustus	5.218	5.429	5.988	5.396	5.613	5.538
September	5.415	5.600	5.827	5.521	5.829	5.662
Oktober	5.725	5.358	5.993	5.727	6.193	5.862
Nopember	5.888	5.162	6.350	5.946	6.096	5.873
Desember	6.085	5.827	6.655	6.186	6.073	5.827

Sumber: BPS (2020) dan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB (2014–2020), diolah

pemasaran gabah dan beras. Hasil penelusuran Idris (2017) menyatakan bahwa tingginya disparitas harga ini yang menjadi masalah, karena ada pedagang perantara yang mendapat keuntungan lebih besar dan membuat harga beras di tingkat pengecer juga tinggi, sementara itu ironisnya petani justru tidak dapat memperoleh peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan pada masa depan adalah mengurangi margin keuntungan di *middle men* (rantai pasok).

Implikasi berikutnya adalah sistem pascapanen dan distribusi beras di dalam negeri tidak efisien dan menyisakan fenomena asimetri pasar yang menjadi kendala serius pembangunan ekonomi. Untuk itu petani harus mengoptimalkan peran kelompok tani dalam kegiatan pascapanen dan pemasaran hasil panen padi secara terpadu dan terkoordinir. Kemudian dalam jangka pendek hendaknya pemerintah mendorong petani untuk menjual gabah dalam bentuk gabah kering giling GKG, sehingga komoditas mempunyai nilai yang tambah dan harganya tidak jatuh pada saat panen raya. Demikian pula pemerintah dapat menetapkan harga tertinggi beras (HET) untuk menjaga harga beras tidak naik terlalu tinggi. Hal ini akan memperpendek rantai pemasaran, sehingga diharapkan dapat memperkecil disparitas antara harga gabah dan harga beras. Dalam hal ini pemerintah perlu membuat kebijakan penetapan harga acuan pembelian dan penjualan beras di hulu dan hilir yang dapat dijadikan mekanisme kontrol pemerintah untuk mengurangi disparitas harga di sisi petani, pelaku usaha dalam jejaring distribusi beras, dan konsumen.

Penyebab kedua terjadinya disparitas harga gabah dengan harga beras dapat dilihat dari seberapa cepat perubahan harga beras ditransmisikan kepada harga gabah. Hal ini dapat ditelusuri melalui hubungan linier antara harga gabah dengan harga beras. Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa harga beras eceran berhubungan positif dengan harga gabah, artinya terjadi transmisi harga beras ke harga gabah secara sempurna karena elastisitas transmisinya lebih besar dari 1 ( $E_t =$

1,162). Kusumah (2018) menyatakan elastisitas transmisi ( $E_t$ ) >1, maka laju perubahan harga ditingkat pedagang lebih besar dibandingkan dengan laju perubahan harga ditingkat produsen. Berarti pula setiap kenaikan harga beras sebesar 10% maka akan diikuti dengan kenaikan harga gabah sebesar sebesar 11,62%. Pengaruh kenaikan harga beras eceran secara nyata (signifikan) terhadap harga gabah dan besarnya pengaruh adalah 80,40% (Tabel 4). Selain itu kekuatan hubungan antara harga beras eceran dengan harga gabah adalah sangat kuat yaitu sebesar 89,80%. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas harga ini disebabkan oleh pola perubahan dari kedua harga tersebut, artinya ketika terjadi perubahan harga beras yang meningkat maka diikuti dengan perubahan harga gabah yang meningkat pula. Pola perubahan dari kedua harga tersebut saling beriringan satu dengan yang lain. Sejalan dengan Hasil penelitian Lastinawati et al. (2018) di Kabupaten Ogan Komering Ulu menyatakan bahwa laju perubahan harga gabah di tingkat petani lebih besar dari laju perubahan harga beras di tingkat konsumen.

Sebaliknya transmisi harga gabah petani ke harga beras ditransmisikan dengan lebih lambat dimana ketika harga gabah petani naik 10% maka akan diikuti dengan kenaikan harga beras sebesar 6,94% (Tabel 5). Transmisi harga yang lebih lambat ini menunjukkan bahwa kenaikan harga gabah direspons oleh kenaikan harga beras yang lebih lambat. Hal ini akan lebih menguntungkan bagi petani karena akan lebih cepat menerima kenaikan harga sebagai akibat kenaikan harga beras. Ada beberapa kebijakan yang mendukung hal ini seperti kebijakan penetapan harga dasar gabah yang diikuti dengan waktu pembelian gabah yang tepat, juga adanya dana talangan untuk membeli gabah petani oleh lembaga Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang sudah berjalan sejak tahun 2008 ikut serta merespon kenaikan harga gabah petani. Sejalan dengan pendapat Hermawan et al. (2008) menyatakan bahwa kebijakan untuk meningkatkan dana talangan pemerintah memberikan dampak terhadap kenaikan harga

Tabel 4. Elastisitas transmisi harga beras ke harga gabah petani di Pulau Lombok, 2014-2019

Variable	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.364	.576		-4.101	.000
Harga beras eceran	1.162	.063	.898	18.495	.000

Keterangan: Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) = 0,804, dan Koefisien Korelasi ( $r$ ) = 0,898

Tabel 5. Elastisitas transmisi harga gabah ke harga beras di Pulau Lombok, 2014-2019

Variable	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.415	.311		10.966	.000
Harga GKG	.694	.038	.898	18.495	.000

Keterangan: Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) = 0,807, dan Koefisien Korelasi ( $r$ ) = 0,898

gabah petani. Tidak saja lembaga seperti Bulog, DPM-LUEP yang mendukung pembelian gabah petani tetapi lembaga pemasaran seperti penggilingan dan grosir ikut serta membeli gabah petani dengan kata lain permintaan gabah petani meningkat dan mempercepat harga gabah naik, jadi lembaga ini merespon kenaikan harga gabah petani secara positif.

Hasil penelitian Andiojaya (2021) menyatakan respon harga gabah di tingkat penggilingan dan grosir lebih cepat dibandingkan tingkat eceran. Dilihat dari sisi struktur pasar gabah yang terjadi di Pulau Lombok maka pemasaran yang berlaku adalah pemasaran gabah persaingan tidak sempurna (oligopsoni) karena elastisitas transmisinya lebih besar dari satu ( $\epsilon = 1,162$ ) dan berarti pemasaran gabah belum efisien. Dalam realitanya petani berhadapan dengan sejumlah kecil pedagang pengepul yang membeli gabah petani. Sejalan dengan hasil penelitian Sutisna (2021) menyatakan bahwa belum efisiennya pemasaran yang terbentuk adalah ditunjukkan oleh nilai elastisitas transmisi lebih besar dari satu. Berarti kekuatan tawar menawar dalam pemasaran gabah masih dipegang oleh pedagang pengepul, sejumlah kecil pedagang pengepul berhadapan dengan jumlah petani yang begitu banyak. Inilah variasi perilaku pasar yang terjadi pada kebanyakan produk pertanian termasuk gabah. Sejalan dengan hasil penelitian Weldegebriel et al. (2012) dan Etienne et al. (2016) bahwa asumsi perilaku pasar yang bervariasi dapat dilihat dari elastisitas transmisi harga relatif pada pasar persaingan tidak sempurna serta bergantung pada perilaku yang menurun atau meningkat.

Tingginya fleksibilitas transmisi harga pada periode ini (2014-2019) dapat diterangkan bahwa selama periode tersebut transaksi jual beli gabah meningkat terus karena disinyalir bahwa produksi gabah petani di Pulau Lombok tidak saja dibutuhkan untuk konsumsi domestik penduduk Pulau Lombok namun juga dibutuhkan untuk daerah-daerah lain seperti Bali, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTB khususnya pulau Lombok adalah salah satu wilayah sentra produksi padi di Indonesia, oleh karena itu sebagai wilayah sentra produksi padi maka

seharusnya mendistribusikan padi ke daerah-daerah defisit produksi padi guna mencukupi kebutuhan beras daerah tersebut.

Fleksibilitas transmisi harga dalam suatu analisis pemasaran biasanya menjadi cerminan adanya perbedaan pandangan antara produsen gabah (petani) disatu pihak yang menginginkan harga gabah yang tinggi, dengan pembeli (pedagang) di pihak lain yang menginginkan harga yang rendah dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu kelembagaan yang efisien harus dapat mengakomodasikan sebesar-besarnya dari dua kepentingan yang berbeda tersebut.

### Efektivitas Kebijakan HPP

Kebijakan HPP dapat berjalan secara efektif tercermin dari seberapa besar pengaruh perubahan harga pembelian pemerintah dan harga beras di tingkat pengecer terhadap perubahan harga gabah petani. Tujuan kebijakan HPP ini adalah untuk menjaga stabilitas harga gabah petani agar tidak terjadi fluktuasi harga yang tinggi serta pada puncak musim panen harga gabah tidak jatuh. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh variabel harga beras dan harga pembelian pemerintah berpengaruh secara nyata terhadap harga gabah petani (Tabel 6). Ini berarti peran kedua variabel ini sangat penting dalam mempengaruhi harga gabah petani. Besarnya pengaruh variabel tersebut sebesar 82%, berarti harga beras dan harga pembelian pemerintah secara bersama-sama memengaruhi harga GKP sebesar 82%.

Pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel harga beras eceran dan HPP berpengaruh secara nyata terhadap harga gabah petani. Untuk variabel harga beras eceran, besaran koefisien regresinya sebesar 0,402, artinya bila variabel lain dianggap konstan maka setiap kenaikan harga beras eceran sebesar Rp 1.000,- maka akan meningkatkan harga gabah petani sebesar Rp402,- per kilogram, sedangkan untuk variabel HPP, besaran koefisien regresinya sebesar 0,596, ini artinya bahwa bila variabel lain diasumsikan tetap, setiap kenaikan harga pembelian

Tabel 6. Analysis of variance

Model	Sum of squares	df	Mean square	F	Sig.
Regression	1.633E7	2	8167376.507	185.027	.000 <sup>a</sup>
Residual	3575470.546	81	44141.612		
Total	1.991E7	83			

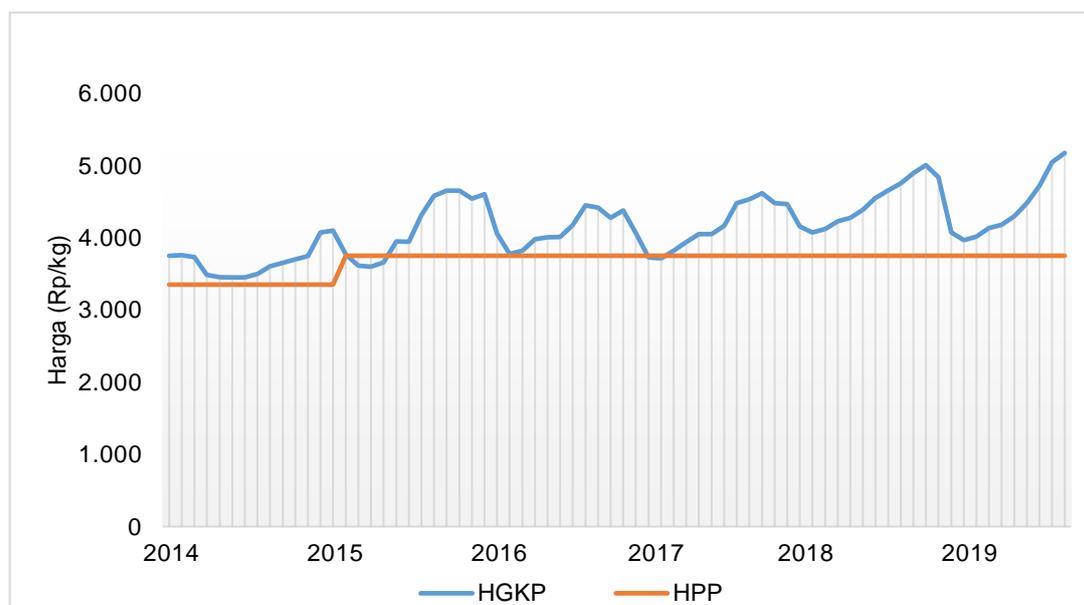
Keterangan: predictor yaitu constant, Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Beras eceran. Dependent variabel yaitu harga GKP

pemerintah sebesar Rp1.000,- maka akan meningkatkan harga gabah petani sebesar Rp596,-. Hal yang penting berikutnya adalah tanda koefisien regresinya, dimana kedua koefisien regresi bertanda positif. Artinya kedua variabel bebas baik HPP maupun HBE mempunyai pengaruh yang positif terhadap harga gabah petani. Berarti pula efek dari penetapan kebijakan harga pembelian pemerintah sesuai dengan harapan yaitu dapat meningkatkan harga gabah petani di atas harga pembelian pemerintah (Gambar 2). Hasil penelitian Maulana dan Rahman (2011) menyatakan kenaikan HPP untuk GKP dan GKG mampu meningkatkan harga aktualnya di penggilingan. Secara rata-rata, sepanjang tahun 2009 harga jual gabah petani dalam bentuk GKP mencapai Rp2.708,- per kg, yang berarti lebih tinggi dari HPP untuk GKP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp2.400,-.

Keefektifan kebijakan HPP dapat dilihat juga dari sejauhmana harga GKP di petani berada di atas HPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

selama periode 2014 sampai dengan 2019 hanya terjadi lima kali dari 72 bulan harga GKP berada di bawah HPP, sekitar 6,94%. Bila dilihat dari musim panen raya setiap tahunnya maka ada 33,3% (dua kali dari enam tahun) harga GKP berada di bawah HPP kselama periode 2014 sampai 2019. Harga GKP berada di bawah HPP terjadi pada Bulan April, Mei, dan Juni tahun 2015 dan Bulan Maret dan April tahun 2017. Berarti ada 93,06% harga GKP berada di atas harga pembelian pemerintah atau sekitar 95 kali (gambar 2).

Sejalan dengan hasil penelitian Maulana (2012) yang menyatakan dengan pertimbangan bahwa harga gabah pada musim hujan umumnya lebih rendah dibandingkan pada musim kemarau, dan panen raya pada tiap musim hujan terjadi umumnya pada bulan Maret dan April, maka kebijakan HPP sejak tahun 2009 telah berhasil melindungi petani dari kejatuhan harga pada saat panen raya. Pada tahun 2011, harga gabah petani pada bulan Maret dan April berada di atas HPP yaitu 15,6% pada bulan



Sumber: BPS NTB 2020

Gambar 2. Perkembangan harga GKP dan HPP periode 2014-2019

Maret dan 20,7% pada bulan April. Hasil penelitian Nainggolan dan Soetjipto (2016) juga menyatakan bahwa kebijakan Harga Pembelian Pemerintah efektif mempengaruhi harga gabah, dan berarti juga kesejahteraan petani meningkat. Selain itu Harga Pembelian Pemerintah juga efektif mempengaruhi produksi padi dengan *time lag* sebesar satu karena harga gabah, sebagai transmisi, signifikan memengaruhi produksi padi.

Dominasi dari harga GKP berada di atas harga pembelian pemerintah sebagai akibat dari peranan penetapan kebijakan harga dasar gabah yang disertai dengan kebijakan pembelian gabah petani oleh pemerintah melalui Bulog. Hal ini sesuai juga dengan hasil analisa regresi pada Tabel 7. yang menyatakan bahwa harga pembelian pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga GKP. Hasil analisis ini sejalan dengan pendapat Suryana et al. (2014) yang menyatakan bahwa perlindungan kepada petani padi melalui kebijakan Harga Pembelian

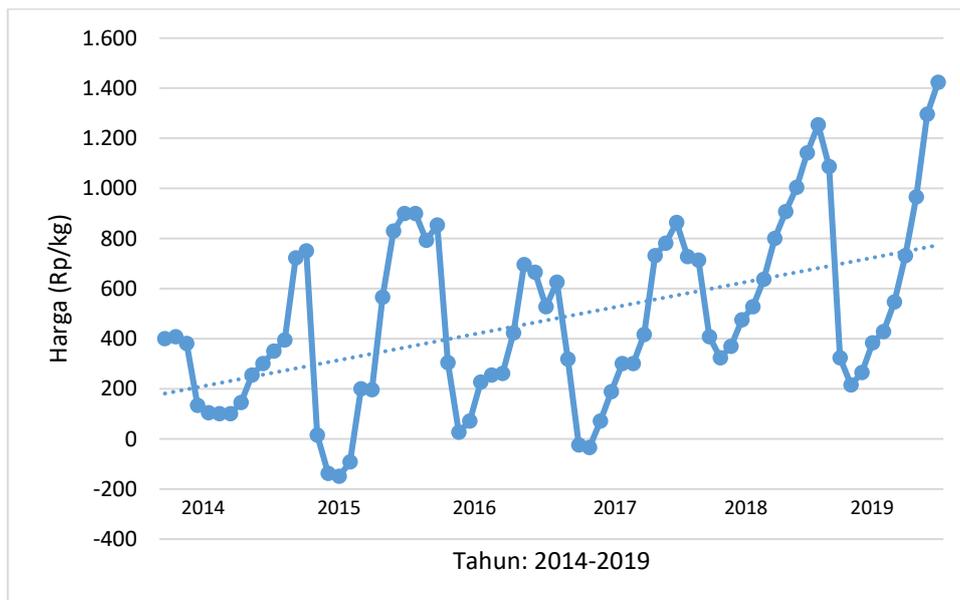
Pemerintah (HPP) gabah juga berdampak positif terhadap perilaku pasar, yang dicirikan oleh tingkat harga gabah yang selalu di atas HPP.

Selama periode ini tren pola perubahan jarak antara harga GKP dengan HPP mengikuti pola yang hampir sama setiap tahun, selisih harga di antara keduanya akan meningkat pada musim paceklik atau musim tanam ketiga (Juli sampai September) dan musim tanam pertama atau musim hujan (November sampai Januari) dan selisihnya menurun pada musim tanam kedua (April sampai Mei) (Gambar 3). Menarik untuk dilihat juga bahwa tren disparitas harga ini terus meningkat dari tahun 2014 sampai 2019. Kondisi ini terkait dengan pola musim yang terjadi di wilayah Indonesia, dimana pada musim penghujan hampir seluruh lahan pertanian di wilayah Indonesia ditanami padi termasuk di Pulau Lombok, kemudian pada musim tanam kedua dan ketiga luas area tanam padi mulai berkurang. Kesamaan antara pola musim dengan pola panen padi juga membawa pola

Tabel 7. Hasil analisis regresi harga GKP, harga beras eceran, dan HPP

Variabel	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	-2026.690	454.535	-4.459	.000
HBE	.402	.034	11.859	.000
HPP	.596	.164	3.626	.001

Keterangan: Koefisien determinasi,  $R^2 = 0,82$ , koefisien korelasi,  $r = 0,906$



Sumber: BPS NTB 2020

Gambar 3. Tren disparitas harga gabah dan HPP periode 2014-219

yang sama terhadap perubahan jarak harga tersebut. Dengan demikian pemerintah telah melakukan antisipasi untuk meredam terjadinya fluktuasi harga gabah yang terlalu tinggi melalui penetapan kebijakan harga pembelian pemerintah setiap tahun.

Disamping itu ada tambahan kebijakan yaitu pembelian gabah petani oleh Bulog(pemerintah) setiap tahun. Namun demikian kemampuan pemerintah untuk membeli gabah petani masih terbatas yaitu sekitar 10%. Pengadaan gabah oleh Bulog di Pulau Lombok tidak tetap sepanjang periode 2014 sampai 2019, sebagai contoh pada tahun 2018 jumlah pengadaan gabah sebesar 796.340,8 ton atau 14,85% dari total produksi gabah, dan pada tahun 2019 pengadaannya menurun menjadi 774.520,7 ton atau 8,79% dari total produksi. Sawit (2011) menyatakan bahwa pengadaan gabah oleh Bulog secara nasional berkisar antara 6% sampai 8%. Tahun 2018 Bulog berhasil merealisasikan pengadaan beras sebesar 1.488.584 ton atau setara gabah sebesar 2290129,23 ton (Bulog 2019). Berarti Bulog baru dapat merealisasikan pengadaan beras sebanyak 4,05 % dari produksi beras nasional sebesar 36.704.330,67 ton atau setara gabah sebesar 59.200.533,72 ton (BPS 2021). Dibandingkan secara nasional pengadaan gabah oleh Bulog di Pulau Lombok masih lebih tinggi. Laporan dari Bulog Divre Nusa Tenggara Barat (2020) menyatakan bahwa jumlah serapan gabah petani sebesar 10% tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 jumlah serapan gabah petani oleh Bulog sebesar 8,73% (BPS 2020; Bulog NTB 2020).

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) pengaruh penerapan kebijakan HPP terhadap stabilitas harga gabah petani (harga GKP) di Pulau Lombok selama periode 2014 – 2019 adalah positif dan signifikan. Tingkat stabilitas harga gabah petani di Pulau Lombok adalah relatif stabil; 2) disparitas harga gabah dan beras masih tergolong tinggi, yaitu disparitas harga gabah petani dan harga beras eceran disebabkan oleh dua faktor yaitu pola perubahan harga gabah dan harga beras eceran, dan fleksibilitas transmisi harga; 3) kebijakan penerapan HPP terhadap stabilitas harga gabah petani selama periode 2014-2019 sudah efektif.

## Implikasi Kebijakan

Direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam rangka stabilisasi harga gabah petani adalah memperkuat kelompok tani dalam merebut posisi tawar petani dengan merubah penjualan gabah dalam bentuk GKP ke GKG, perlu adanya lantai jemur yang memadai di masing-masing kelompok tani, penetapan harga dasar gabah petani baik dalam bentuk GKP maupun GKG masih tetap diperlukan, kebijakan pembelian gabah petani perlu dipertahankan, dan untuk mengurangi disparitas harga gabah dan beras perlu juga ditetapkan harga eceran beras tertinggi. Perlu mempertahankan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan LUEP dan memperbanyak lembaga sejenis dalam mendukung penyerapan gabah petani. Sistem pemasaran gabah dan beras yang belum efisien perlu dibenahi agar tidak terjadi disparitas harga yang tinggi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada lembaga-lembaga yang telah membantu memberikan data-data untuk kepentingan penelitian ini seperti Dinas Pertanian Provinsi NTB, Bulog Divre Provinsi NTB, BPS Provinsi NTB dan penyandang dana PNBPU Universitas Mataram.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar M. 2009. Kemandirian pangan: cadangan umum, stabilisasi harga, dan diversifikasi. *J Anal Kebijak Pertan.* 7(2):107-129.
- Hermawan, Sarjana, Miranti DP, Ambarsari I. 2008. Informasi Asimetris Dalam Transmisi Harga Gabah Dan Harga Beras. *J Litbang Prov Jawa Tengah.* 6(1):61-72.
- Andiojaya A. 2021. Transmisi harga gabah terhadap harga beras: tinjauan arah, besaran dan lama perubahan. *J Sos Ekon Pertan.* 14(2):140-154.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. 2020. Luas Panen dan produksi padi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Internet). (Diunduh 2022 Juni 22). Tersedia dari: <https://ntb.bps.go.id/publication/2021/12/22/711a08262700c27599e3db52/luas-panen-dan-produksi-padi-di-nusa-tenggara-barat-2020--hasil-kegiatan-pendataan-statistik-pertanian-tanaman-pangan-terintegrasi-dengan-metode-kerangka-sampel-area-.html>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. 2021. Statistik Nusa Tenggara Barat 2021. (Internet).

- (Diunduh 2022 Juni 22). Tersedia dari: <https://ntb.bps.go.id/indicator/53/334/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-hasil-ksa.html>.
- Bulog. 2019. Stabilisasi Harga Pangan Oleh Bulog 2019. (Internet). (Diunduh 2021 Maret 9). Tersedia dari: <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jurnal+stabilitas+harga>.
- Bulog Divre NTB (2020). Gabah Petani Dan Harga Patokan Pemerintah. Bulog Divre Nusa Tenggara Barat. (Internet). (Diunduh 2022 Maret 30). Tersedia dari: <https://setda.dompukab.go.id/gabah-petani-hpp.html>.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. 2020. Rekapitulasi Harga Pedagang Eceran Komoditi Tanaman Pangan. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2020. Mataram (ID): Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Etienne XL, Barrera AT, Wiggins S. 2016. Price and volatility transmissions between natural gas, fertilizer, and corn markets. *Agric Finance Rev.* 76(1):151-171.
- Hasan MI. 2017. Pokok-pokok materi statistik 1 (edisi kedua). Jakarta (ID): PT Bumi Aksara.
- Hermanto, Saptana. 2017. Kebijakan harga beras ditinjau dari dimensi penentuan harga. *J Forum Penelitian Agro Ekon.* 35(1):31-43.
- Idris M. 2017. Disparitas Harga Beras Tinggi, Jejaknya ke Konsumen. *Keuangan Detik.* (Internet). (Diunduh 2021 Juli 21). Tersedia dari: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3569075/disparitas-harga-beras-tinggi-begitu-alurnya-hingga-ke-konsumen>.
- Jusar D, Bakee D, Eliza. 2017. Analisis variasi harga beras di Provinsi Riau dan daerah pemasok. *J Dinamik Pertan.* 33(2):137-144.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2010. Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Periode 2010-2014. Jakarta (ID): Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Kusumah TA. 2018. Elastisitas transmisi harga komoditas cabai merah di Jawa Tengah. *Econ Dev Anal J.* 7(3): 294-304.
- Lastinawati E, Mulyana A, Zahri I, Sriati. 2018. Analisis transmisi harga beras di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *J Lahan Suboptimal: J Suboptimal Lands.* 7(1):43-49.
- Maulana M, Rachman B. 2011. Harga pembelian pemerintah beras Tahun 2010: efektivitas dan implikasinya terhadap pembelian beras DOLOG. *J Anal Kebijakan Pertan.* 9(4):331-347.
- Maulana M. 2012. Prospek harga pembelian pemerintah untuk beras multi kualitas di Indonesia. *J Anal Kebijakan Pertan.* 10(3):211-223.
- Nainggolan LB, Sutjipto W. 2016. Analisis efektivitas kebijakan harga pembelian pemerintah untuk beras. *J Kebijakan Ekon.* 11(2):197-209.
- Nuraeni D, Anindita R, Syafriah. 2015. Analisis variasi harga dan integrasi pasar bawang merah di Jawa Barat. *J Habitat.* 26(3):163-172.
- Proborini A, Ekowati T, Sumarjono D. 2018. analisis efektivitas pelaksanaan pasar murah bulog dalam menjaga stabilitas harga beras di DKI Jakarta. *BISE: J Pendidik Bisnis dan Ekon.* 4(1):38-49.
- Rachman B, Agustian A, Syaifudin A, 2019. Dampak kebijakan harga pagu beras terhadap profitabilitas usahatani padi, harga beras, kualitas, dan pengadaan. *J Anal Kebijakan Pertan.* 17(1):59-77.
- Saludin. 2017. Pengantar ekonometrik: teori dan aplikasi dengan perangkat lunak minitab. Bogor (ID): Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sawit MH. 2011. Reformasi kebijakan harga produsen dan dampaknya terhadap daya saing beras. *J Pengemb Inov Pertan.* 4(1):1-13.
- Setiawan AF, Harianto A. 2014. Fluktuasi harga pangan dan dampaknya terhadap inflasi di Provinsi Banten. *J Pertan Sumber Daya Ekon Lingk.* 1(2): 81-97.
- Sobichin M. 2013. Nilai rantai distribusi komoditas gabah dan beras di Kabupaten Batang. *Econ Dev Anal J.* 2(1):1-11.
- Suryana A, Rachman B, Hartono MD. 2014. Dinamika kebijakan harga beras dalam mendukung ketahanan pangan nasional. *J Pengemb Inov Pertan.* 7(4):155-168.
- Sutisna AD. 2021. Analisis integrasi pasar dan transmisi harga gabah di Provinsi Lampung. *AgriHumanis: J Agric Human Res Dev Stud.* 2(2):81-88.
- Weldegebriel HT, Wang X, Rayner AJ.(2012). Price transmission market power and industry technology: a note. *China Agric Econ Rev.* 4(3):281-299.